

**PEMBAURAN AGAMA
DAN STRATEGI POLITIK KEBUDAYAAN
(KONTESTASI IDENTITAS ETNIS
DALAM NARASI MASYARAKAT MULTIKULTUR)**

Ibnu Mujib

*Interfaith Forum for Peace in Asia (IFPA) Jogjakarta
Jalan Damai, Gg. Sunan Muria 021 Jaban, Sinduharjo, Sleman, Yogyakarta 55581 Telp: (0274)
7135569 e-mail: ibnumujib06@yahoo.com*

Abstract

As a strategy of the politic of culture, religious assimilation constructed in New Order has become a concept which is considered ineffective and failure. The Post-reformation era has become the sign of the failure of the concept of religious assimilation. The policy of the religious assimilation which is designed for reducing conflicts between "Pribumi vs Tionghoa", in fact, it has sharpened and deepened the gaps between the two groups. Religious conversion by the Chinese in terms of assimilationism of New Order turns to be a political strategy to describe and to have the pribumi identity which is considered as the majority and muslim. It is a political strategy to hide the aspects of Chinese and Non-muslim in their identity in order to be accepted as "Pribumi." In this case, everyone can claim their own identity and say "who I am," "who you are", and "who we are". By doing so, it is part of the way for people to understand about each identity that emphasize the common identity. In the future, for the agenda of assimilation, religious conversion will lose its relevance, especially in the context of contestation of global culture. It is seen that the process of assimilation appears from social engineering that separates the differences of cultural roots of "Tionghoa-Pribumi" while the contestation of culture in area of multiculturalism reunites the entity of diversity into the single identity. Therefore, The celebration of Chinese new year (IMLEK) in mosques in Yogyakarta becomes a form of integration of identity between Tionghoa-Islam and Java.

Key words: religious assimilation, strategy of the politic of culture, contestation of identity

Pendahuluann

Penjelasan Heidegger dalam *"The Age of World Picture"* (1938) bahwa dengan meluasnya budaya pencitraan di berbagai ruang, telah mengkonstruksi narasi kebudayaan secara meluas, bahkan dunia tempat kita hidup pada akhirnya berubah wujud menjadi tak lebih dari sebuah ontologi citraan. Pada saat citra menjadi jaminan kognitif yang mempengaruhi akar kehidupan masyarakat, maka seolah kita dikelilingi oleh berbagai citraan-citraan, baik melalui foto, majalah, billboard, televisi, video, film, internet, dll. Melalui kekuatan pencitraan inilah, kemudian citra menjadi cermin dalam mencari identitas sekaligus eksistensi diri. Demikian itu menjelaskan kepada kita bahwa kontestasi identitas etnis maupun agama dalam narasi kebudayaan telah mendefinisikan sebuah strategi politik pencitraan, di mana di dalam aspek ini, pencitraan membawa pengaruh pada bentuk-bentuk identitas yang lebih luas (Stone, 1989: 11).

Pada saat masyarakat tengah mengalami perubahan nilai karena desakan kultur global, pola dan cara pandang modernitas mengalami tantangan yang serius. Bahkan strategi modernitas kehilangan maknanya dan tidak lagi bisa bekerja dalam kondisi posmodern (Ritzer, 2004: 339). Strategi pembauran yang dianjurkan oleh rezim Orde Baru tidak lagi efektif dan bisa dikatakan gagal. Orde Baru memandang perbedaan yang ada di masyarakat sebagai ancaman yang harus dilenyapkan, sementara desakan keterbukaan akibat globalisasi telah mengubah pandangan masyarakat. Kondisi posmodern menghadirkan perbedaan sebagai kekayaan, situasi ini juga menyebabkan terjadinya peleburan entitas perbedaan satu sama lain sehingga perbedaan itu sendiri menjadi semakin kabur (Delanty, 2003: 104-105).

Perayaan Tahun Baru Imlek di sebuah masjid di Yogyakarta oleh sekelompok muslim Tionghoa Muslim telah merekonstruksi sebuah identitas sekaligus meramaikan kontestasi dalam politik kebudayaan Indonesia pasca runtuhnya sebuah rezim hegemonis (Orde Baru). Pesan dari peristiwa tersebut adalah sebuah strategi dekonstruksi terhadap pembacaan atas perbedaan yang dibangun atas asumsi politis dan prasangka Orde Baru terhadap minoritas Tionghoa di Indonesia. Konversi agama dalam lingkup asimilasionisme Orde

Baru merupakan strategi politis untuk mengambil identitas pribumi yang mayoritas dan dicitrakan sebagai muslim. Sebuah strategi politis kultural untuk meniadakan dan menegasikan 'kecinaan' dan 'ke-nonmusliman' untuk sebuah penerimaan sebgai dari 'kita' (pribumi).

Kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pasca keputusan presiden No. 6 tahun 2000, di Era Abdurrahman Wahid ini merupakan satu langkah substantif yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan persoalan hubungan antara warga etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia secara umum (pribumi). Hubungan antara warga etnis Tionghoa dengan pribumi masih menyimpan persoalan menyangkut sistem sosial, persoalan keadilan dan kesetaraan, dan rekayasa politik. Akibat persoalan yang belum tertuntaskan ini, hubungan warga keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi masih diwarnai ketegangan, ketidakharmonisan yang berakhir pada tindak kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Warga etnis Tionghoa yang beragama Islam relatif lebih "diterima" oleh masyarakat pribumi. Kedekatan kultur keagamaan ini merekatkan rasa empati dan persaudaraan yang mendalam. Perasaan curiga, kesenjangan status sosial dan warna kulit semakin berkurang. Aktivis program asimilasi (pembauran) H. Junus Jahja menganjurkan penggunaan konversi agama bagi keturunan Tionghoa ke agama Islam sebagai sebuah cara untuk lebih bisa diterima (membaur) dengan masyarakat pribumi.

Beberapa pekan sebelum perayaan tahun Baru Imlek di Masjid itu dilakukan, tokoh Muslim Tionghoa Yogyakarta, Budi Setyagraha mengemukakan kepada publik bahwa perayaan tahun baru Imlek bukan merupakan sebuah ritual keagamaan, namun lebih sebagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam menanti pergantian tahun. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut tahun baru dengan ungkapan syukur dan do'a dengan harapan terciptanya kesejahteraan yang lebih baik di tahun berikutnya. Ia menambahkan tradisi ini bisa dirayakan oleh siapa saja dari golongan agama manapun karena tidak mengandung unsur ritual keagamaan agama tertentu. Tidak hanya itu, tambah Budi bahwa Imlek juga pernah dilaksanakan di salah satu Gereja di kota Yogyakarta, gereja katedral kotabaru, yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa penganut Kristen dengan leluasa dan mendapat dukungan dari pendeta agama Kristiani.

Salah satu organisasi Islam yang cukup radikal, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Yogyakarta menentang rencana perayaan Tahun Baru Imlek di Masjid ini karena menganggap adanya unsur bid'ah, khurafat sehingga merusak aqidah Islam. Sehingga mereka mengharamkan perayaan Imlek dilaksanakan di Masjid (Radar Jogja, 9/02/2004). Pernyataan itu ditegaskan Ketua Majelis Mujahidin Daerah Istimewa Yogyakarta Irfan S. Awwas menentang acara tersebut, bahkan mengancam akan menggagalkan perayaan Imlek di Masjid itu. Ia menambahkan bahwa Imlek adalah ritual keagamaan tertentu yang mengandung unsur peribadatan terhadap Tuhan jenis lain (pemujaan), karena itu masuk kategori syirik.

Studi ini akan mendiskusikan apakah strategi kultural yang dilakukan komunitas masyarakat muslim Tionghoa di Yogyakarta dengan pendekatan atau yang disebut pembauran melalui agama, dapat menjadi solusi bagi persoalan hubungan etnis Tionghoa di Indonesia secara umum? Apakah strategi pembauran masih relevan dalam kontestasi kebudayaan global, terlebih menyangkut bagaimana kebijakan pemerintah mengatasi hubungan etnis Tionghoa-masyarakat Indonesia. Sementara meluasnya perbedaan dalam konteks masyarakat multikultur menuntut kearifan tersendiri?

Model Perayaan Imlek di Jogja: Dinamika atas Tionghoa Islam Indonesia

Komunitas warga Tionghoa Muslim di Yogyakarta yang tergabung dalam Persatuan Islam tionghoa Indonesia (PITI) cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kedua kalinya merayakan Tahun Baru Imlek 2555 di Masjid Syuhada Kotabaru. Perayaan tahun baru Imlek di Masjid pertama kali dilakukan tahun sebelumnya, Imlek 2554 (2003 Masehi). Perayaan ini didasarkan atas keyakinan bahwa Imlek bukanlah milik suatu agama tertentu, namun lebih kepada tradisi yang dimiliki secara universal oleh setiap warga keturunan Tionghoa. Sehingga setiap warga keturunan berhak untuk merayakan, menunjukkan dan memperingati datangnya tahun baru Imlek. Komunitas Islam Tionghoa di Yogyakarta ini juga yakin bahwa Imlek hanyalah sebuah sistem penanggalan yang dibuat oleh nenek moyang mereka dan bisa dirayakan sebagai sebuah tradisi yang layak dilestarikan.

Sebagaimana orang Jawa memiliki penanggalan (kalender) Jawa dan sampai kini masih dipakai dan dijadikan pedoman oleh sebagian masyarakat Jawa.

Perayaan Imlek di masjid tahun 2554 digelar atas ide tokoh dan pengurus PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Setyagraha. Perayaan Imlek di Masjid ini dikatakan sebagai hal yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Saat pertama kali dilontarkan, ide ini menimbulkan kontroversi terutama kelompok Islam “garis keras” seperti Majelis Mujahidin Indonesia cabang Yogyakarta. Ide Budi Setyagraha untuk merayakan Imlek di Masjid, seperti yang diungkapkan ke media hanyalah untuk menegaskan bahwa Imlek adalah sebuah tradisi kebudayaan Tionghoa yang melekat pada semua warga keturunan Tionghoa terlepas dari ritual agama tertentu (Konghucu). Sementara beberapa kelompok organisasi Islam, seperti Majelis Mujahidin, melihat masih adanya unsur *bid'ah* (syirik) dalam perayaan Imlek yang membahayakan aqidah Islam.

Akhirnya dengan penjagaan yang cukup ketat menyusul adanya ancaman majlis mujahidin yang akan membubarkan acara itu, perayaan Imlek tersebut berjalan dengan lancar dan khidmat. Imlek tersebut hanya diisi dengan shalat hajat dan sujud syukur yang dilaksanakan usai ibadah shalat Isya. Puluhan warga muslim Tionghoa di Yogyakarta tampak mengikuti acara tersebut. Sementara aparat keamanan dan juga pengamanan yang dilakukan oleh beberapa kelompok Islam ikut menjaga situasi keamanan diluar Masjid. Perayaan Imlek 2555, dilaksanakan lebih terbuka dan leluasa. Imlek di Masjid dirayakan biasanya tidak tepat pada hari pergantian tahun baru, biasanya dilakukan antara tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan pertama tahun Imlek. Berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya, perayaan Imlek tahun 2555 ini tidak lagi memicu kontroversi dan tentangan dari kelompok Islam. Hal ini bisa jadi akibat usaha yang dilakukan oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Yogyakarta yang secara proaktif mengintrodusir Imlek sebagai sebuah tradisi kebudayaan, bukan ritual agama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PITI antara lain dengan menggelar seminar akademis bertema “Imlek dalam Perspektif Budaya, Filasafat Tionghoa, dan Syariat Islam” dengan menghadirkan kalangan akademisi dan guru besar di bidang filsafat Tionghoa.

Perayaan tahun baru imlek di Masjid Syuhada, kedua kalinya dilaksanakan tanggal 30 Januari 2003 dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2555. Menariknya, acara ini merupakan kerja sama PITI DIY dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada (STAIMS) yang sehari-hari ber-kampus di sana. Seperti sebelumnya, acara ini dilaksanakan secara sederhana. Namun demikian warna redup lampion-lampion merah yang dipasang di pelataran dan bagian luar masjid bersejarah di Kota Yogyakarta itu membuat nuansa masjid menjadi tampak lain. Acara dilaksanakan malam hari. Menjelang waktu shalat isya puluhan warga muslim Tionghoa juga warga muslim non-Tionghoa menghadiri acara itu. Hadir dalam perayaan ini tokoh dari ulama Islam Yogyakarta yang juga ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia) Yogyakarta, KH. Toha Abdurrahman.

Prosesi Perayaan ini diawali dengan shalat isya berjamaah, kemudian disusul dengan shalat sujud syukur dan shalat hajat. Dalam Islam, sujud syukur dikenal sebagai ritual shalat yang khusus dilaksanakan ketika orang mendapatkan kebahagiaan, rejeki, sebagai bentuk kesyukuran dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan-Nya. Sementara shalat hajat biasa dilakukan oleh umat Islam sebagai ungkapan permohonan untuk dikabulkannya semua harapan atau dilaksanakan ketika membutuhkan suatu pertolongan dan keinginan tertentu. Shalat hajat dan shalat sujud syukur dalam perayaan Imlek ini langsung diimami oleh ketua MUI DIY KH Toha Abdurrahman. Usai shalat dilantunkanlah do'a-do'a syukur kepada Allah SWT. dan do'a bagi para leluhur, orang tua dan nenek moyang serta do'a memohon kesejahteraan dan keselamatan di masa yang akan datang.

Setelah ritual shalat selesai dilaksanakan warga Tionghoa dan warga lainnya yang ikut menghadiri perayaan Imlek tersebut menikmati hidangan makan malam yang tidak terlalu istimewa, soto ayam. Usai makan malam warga Tionghoa bekerja sama dengan STAIMS (Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada), di tempat yang sama menggelar saresehan bertema "Merajut Ukhuwah menuju Masyarakat Yang Berbudaya". PITI DIY masih perlu terus mengintrodusir tentang keabsahan perayaan Imlek di Masjid. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa Imlek adalah bagian dari tradisi Tionghoa yang layak diperingati dan dirayakan oleh keturunan Tionghoa,

termasuk yang beragama Islam. Sebagaimana Umat Islam lainnya merayakan tahun baru Islam (*Hijriyah*), atau merayakan Tahun Baru Jawa.

Pembauran Agama: Sebuah Strategi Politik Kebudayaan

Program pembauran yang lebih dikenal dengan asimilasi dibedakan dengan program integrasi. Integrasi dilakukan dengan tetap mempertahankan identitas “kecinaan”, sebagai suku yang sederajat dengan suku-suku lain di Indonesia. Sedangkan konsep asimilasi (pembauran) berarti menghilangkan identitas “kecinaan” itu secara berangsur-angsur. Seminar Kesadaran Nasional tanggal 13-15 Januari 1961 menyimpulkan bahwa yang dimaksud asimilasi bagi WNI keturunan Tionghoa adalah; masuk dan diterimanya seorang yang berasal dari keturunan Tionghoa ke dalam tubuh bangsa Indonesia tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongan yang khas tidak ada lagi (Nurhadiantomo, 2004: 201).

Secara etimologis, asimilasi bermakna “membuat mirip atau serupa”, makna sosialnya adalah “melebur dan membaur pada komunitas yang lebih besar”. Bagi kelompok yang sudah berasimilasi maka mereka harus membaur atau melebur kepada komunitas yang lebih besar dan biasanya lebih berkuasa (Barry, 2001: 72). Peleburan atau pembauran ini dilakukan kelompok kecil ke kelompok besar karena motivasi identifikasi diri (identitas), tekanan politis dan kultural atau karena kelemahannya sebagai kelompok kecil (minoritas) ditengah kelompok yang jauh lebih besar. Ide keharusan asimilasi bagi warga Tionghoa Indonesia telah bergulir sejak awal masa kemerdekaan. Sejak awal masa revolusi telah dibentuk sebuah lembaga yang khusus membicarakan masalah Tionghoa Peranakan dan Bangsa Asing (Urusan Peranakan dan Bangsa Asing) didirikan dibawah kementerian atau Departemen Dalam Negeri. Tugasnya adalah mengadvokasi upaya asimilasi semua kelompok minoritas. Namun tidak disebutkan tugas detail dan konsep dari advokasi ini (Coppel, 1976: 50). Yang jelas, lembaga ini tidak hanya mengadvokasi asimilasi bagi warga Tionghoa, tapi juga keseluruhan warga asing yang ada di Indonesia seperti Arab dan ekspatriat (Eropa) yang masih tinggal di Indonesia.

Pada tahun 1932, sejumlah tokoh politik Tionghoa Peranakan dari Partai Tionghoa Indonesia (PTI) menyatakan “Tekad Asimilasi”. Tekad ini

semakin mengental pada periode berikutnya pada masa pergolakan politik di akhir masa kepresidenan Ir. Sukarno, dan tarik menarik hubungan RI dan Republik Rakyat Cina (RRC). Gerakan asimilasi ini kemudian diformalkan ketika digulirkan pada sebuah seminar “Kesadaran Nasional” tanggal 13-15 Januari 1961 di Bandungan, Ambarawa. Seminar ini menghasilkan “Piagam Asimilasi” yang isinya menyebutkan pernyataan keyakinan atas terwujudnya cita-cita nasional melalui asimilasi (Rajab, 1995: 43). Asimilasi dan nasionalisme merupakan pengkristalan ideologis yang dimunculkan dari seminar ini.

Pembauran melalui konversi agama dinilai efektif untuk menghilangkan stereotipe, dan konversi ke agama Islam dinilai lebih efektif dibanding pembauran melalui konversi ke agama Kristen, atau Budha. Alasannya etnis Tionghoa, secara historis, sebenarnya lebih dekat dengan Islam. Leluhur Tionghoa (Cina) banyak yang beragama Islam, bahkan kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam di Jawa didirikan oleh keturunan Tionghoa (Raden Fatah). Sayangnya, bukti-bukti historis dan literatur tentang hal itu tidak banyak diungkap, bahkan di zaman rezim Orde Baru banyak buku-buku diantaranya yang dilarang beredar. Alasan lainnya, Islam adalah agama mayoritas di Indonesia sehingga ketika memeluk Islam, seorang Tionghoa akan menjadi bagian dari mayoritas sehingga lebih bisa diterima. Dengan memeluk Islam pula, tidak akan ada lagi masalah dalam hubungan “pribumi-nonpribumi” (Setyagraha, 2004: 45).

Penganjur pertama tentang pembauran etnis “Tionghoa-Pribumi” melalui konversi ke agama Islam adalah Junus Jahja (Lauw Chuan Tho), seorang Tionghoa pergerakan, alumnus fakultas ekonomi di *Nederlandse Economische Hogeschool*. Pada tahun 1979 Junus Jahja memeluk agama Islam dan telah menunaikan ibadah haji. Soal pembauran melalui konversi agama ke Islam ini Junus Jahja mengatakan “Setelah seorang keturunan Tionghoa menjadi Muslim, maka keadaannya sungguh berlainan. Antara si “pri” (yang umumnya Islam) dan “non-pri” keturunan Tionghoa, yang masuk menjadi Muslim terjadilah suatu hubungan batin luar biasa menakjubkan. Persamaan agama (Islam) menciptakan hubungan mesra dan mengharukan sebagai sesama saudara seagama. Islam mengajarkan bahwa ada saudara sekandung dan saudara seagama. Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits arti

dan nilai saudara sekandung tidak lebih besar dari nilai saudara agama. Bahkan saudara sekandung bisa berbeda agama dengan segala konsekuensinya di akhirat, tapi saudara seagama sifatnya abadi dunia-akhirat” (Jahja, 1991: 56).

Atas dasar itu, Junus Jahja yakin akan terciptanya suatu landasan bersama (*sense of belonging together*), persamaan nasib dan seterusnya yang tak dapat tergoyahkan. Maka terlaksana dan selesailah pembauran secara otomatis dan si “non-pri” menjadi dan diterima sebagai “orang kita” oleh penduduk sekelilingnya. Sehingga persoalan pokok bagi semua pihak kini ialah bagaimana mengamankan ajaran Islam demi Nusa, Bangsa dan Agama. Selesainya proses pembauran (asimilasi) yang maha menakjubkan dan “serta-merta” itu mengandung tanggung jawab yang besar bagi Muslimin keturunan Tionghoa. Berkat keislamannya ia langsung berkenan di hati rakyat dan tidak ada lagi garis pemisah yang menjurangi satu dengan yang lainnya (Jahja, 1984; 137).

Junus Jahja memperkuat idenya dan melegitimasinya dengan mengutip beberapa pandangan Ulama waktu itu (1980-1990) seperti KH. Imron Rosyadi (anggota DPR) yang mengatakan “PITI adalah pembauran yang konkret, orang yang masuk Islam otomatis sudah melakukan pembauran”, Buya Hamka (Ketua Umum MUI) “Dan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam diterima oleh rakyat dengan baik, sehingga terbaaur dengan sendirinya secara tuntas”, Dr. Wahyu Kusumanegara (eks Ketua Umum KENSI) “ Bahwa saudara-saudara keturunan asing baik Tionghoa, Arab maupun Belanda atau yang lainnya, kalau sudah melarutkan diri dalam masyarakat kebangsaan dan memeluk agama yang dianut oleh 90 % penduduk mereka tidak bisa dibedakan lagi” (Junus Jahja, 1991: 162). Bagi Jahja, identitas keislaman sangat penting sebagai solusi puncak dari ‘masalah Cina’ (Tionghoa).

Namun masalahnya ia gagal melihat kemungkinan konflik antar identitas agama di satu sisi dan identitas nasional sebagaimana identitas etnis di sisi lain. Jahja percaya bahwa Islam adalah faktor pemersatu di Indonesia, namun ia tidak melihat kemungkinan konflik antar umat Islam sendiri (Coppel, 1997: 190). Jahja juga terkesan menyederhanakan dasar

persoalan dan alasan politis dari asimilasi. Dukungan pemerintah (Orde Baru) tidak dibaca sebagai sikap politis dan akibat lemahnya posisi politis warga Tionghoa. Pembauran melalui konversi agama Islam ini berkembang menjadi dakwah Islam kepada kalangan etnis Tionghoa melalui pengajian, majlis taklim yang juga disokong oleh Majelis Ulama Indonesia terutama saat dipimpin oleh Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA). Pemerintah Orde Baru berkepentingan untuk mendukung gerakan dakwah ini, terutama era antara tahun 1970-an sampai menjelang tahun 1990-an, dengan mendorong munculnya bentuk-bentuk kegiatan yang bertema keislaman dengan misi pembauran seperti “pengajian pembauran”, “majlis taklim pembauran” sejalan dengan agenda pemerintah “mempererat kesatuan dan persatuan bangsa” (Guibernau, 1997: 80).

Wacana “pengislaman” adalah metode kolonialis sebagaimana kaum modernis melakukan “pemberdayaan”, dan “pembangunan”. Sesuatu yang tradisional dipandang kuno dan ketinggalan zaman sehingga harus disingkirkan dan dibuat menjadi modern. Etnis Tionghoa “dipaksa” menghilangkan memori mereka tentang tanah leluhur, tanah kelahiran, pengetahuan tentang “ibu pengetahuan” mereka dan dikenalkan dengan “pengetahuan baru”, yaitu Islam dan pribumi. Di sisi lain, pengislaman merupakan sebuah upaya dekonstruktif atas stereotipe kolonial (penjajah Belanda) yang menempatkan Islam sebagai agama “kelas bawah” dibanding agama Kristen sebagai agama “Orang Eropa” (penjajah).

Stereotipe ini dikembangkan oleh penjajah Belanda seiring dengan anggapan bahwa Orang Eropa lebih hebat daripada orang pribumi. Pandangan ini membuat etnis Tionghoa yang juga ditempatkan oleh penjajah Belanda lebih tinggi daripada pribumi setelah Eropa (kulit putih) mengalami hambatan psikologis untuk memeluk Islam. Karena dengan memeluk “agama pribumi” akan menurunkan martabat mereka sama dengan pribumi (Humphrey, 2002: 102-104). Dengan demikian etnis Tionghoa yang memeluk Islam meleburkan diri dalam identitas “*Inlander*” ini telah melakukan resistensi atas pandangan kolonial. Selain itu, munculnya organisasi etnis Tionghoa yang berorientasi kebangsaan (nasionalis) yang berujung pada ide “pembauran” tidak terlepas dari keberadaan organisasi etnis Tionghoa yang berorientasi pada tanah leluhurnya, eksklusif dan dipeng-

aruhi ideologi komunis, yakni Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia).

Tarik menarik kepentingan politis dari proses identifikasi ini muncul pula pada pertentangan kelompok Tionghoa. Kelompok etnis Tionghoa yang memilih berasimilasi, mengkampanyekan pembauran dalam Musyawarah Asimilasi 10-12 Maret 1963, membentuk wadah yang diberi nama Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB), sebagai organisasi tandingan Baperki yang berafiliasi politik kepada Partai Komunis Indonesia juga orientasi politik ke Peking (RRC). Sementara LPKB mendapat dukungan dari kalangan agamawan dan ABRI. LPKB kemudian dibubarkan dan dileburkan ke dalam Departemen Dalam Negeri pada tanggal 16 Desember 1967. Baperki dianggap berperan ikut membuat kisruh hubungan Tionghoa-pribumi. Aktivis Baperki yang tetap mengakar pada “ibu pengetahuan” mereka (RRC) terjebak pada identifikasi ideologi komunis (kiri).

Pasca peristiwa Gerakan 30 September, semua organisasi yang berafiliasi pada komunis (kiri) dibubarkan oleh Orde Baru termasuk Baperki (Suryadinata, 2004: 78). Pengawasan terhadap warga Tionghoa terus dilakukan oleh Orde Baru. Tanggal 28 Oktober 1977 dengan semangat Sumpah Pemuda, pemerintah Orde Baru membentuk lembaga khusus yang mengurus masalah pembauran etnis Tionghoa-Pribumi. Sejumlah tokoh warga Tionghoa seperti K. Shindunata, Hasjim Ning, Abdjan Sulaiman, R. Safiudin, Ridwan Saidi, Nyoo Han Siang, Lo SH Ginting, dan Junus Jahja didorong untuk membentuk Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB). Lembaga ini kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada 31 Desember 1977. Namun 21 hari sebelumnya Mendagri Amir Machmud mengeluarkan kebijakan yang justru dianggap kontra produktif dan menghalangi tujuan yang ingin dicapai oleh Bakom PKB, yakni instruksi No X 01/1977 tentang peraturan khusus menyangkut Kartu Tanda Penduduk (KTP) “Warga Negara Republik Indonesia keturunan asing”.

Instruksi ini menimbulkan upaya diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan dikeluarkan secara rahasia (Jahja, 2002: 214-215). Sebelumnya, pemerintah juga mendirikan sebuah lembaga Panitia

Penyuluhan Asimilasi (tahun 1960), yang ditampung dalam SUAD-V Badan Pembina Potensi Karya, yang untuk itu didirikan Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa. Gerakan asimilasi selanjutnya langsung ditangani oleh pemerintah dengan dukungan militer seperti dibentuknya Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Melalui Keppres 140/1963 tanggal 18 Juli 1963, badan ini menjadi badan resmi pemerintah di bawah Menko Hubungan dengan Rakyat, waktu itu dijabat Dr. Roeslan Abdulgani. Pada akhirnya persoalan agenda asimilasi ini masuk dalam kerangka besar pembangunan Indonesia, yakni masuk dalam draf Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 dan tahun 1988. Pada GBHN 1988 disebutkan: “usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan sosial” (Jahja, 1991: 80).

Sejauh mana keberhasilan konversi ke agama Islam sebagai sebuah strategi pembauran. Junus Jahja dan beberapa ulama seperti HAMKA baru menjawab bahwa dengan memeluk agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia (90 %) upaya pembauran telah tuntas. Junus Jahja menunjukkan fakta dan pengalamannya, setelah dirinya memeluk agama Islam merasa lebih diterima untuk menjadi orang kita (Jahja, 1991: 59). Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) juga menyokong upaya pembauran melalui konversi agama ini, meski tidak menyebutnya sebagai syarat mutlak untuk suksesnya pemabauran. Meski Ketua Umum Bakom PKB K. Shindunata yang beragama Katolik mengatakan dukungan Bakom itu bukan berarti Bakom menganjurkan kepada warga etnis Tionghoa untuk memeluk agama Islam. Menurut dia, agama terlalu suci dan azasi untuk sekedar dijadikan “alat” pembauran.

Majlis Ulama Indonesia pada tahun 1980-an yang diketuai oleh HAMKA menyatakan “Dalam kehidupan sehari-hari, tampak bahwa orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam diterima oleh rakyat dengan baik, sehingga terbaur dengan sendirinya secara tuntas” (Kompas, 1980: 12). Selain itu, Islam dianggap bukanlah pilihan yang paling tepat bagi warga keturunan Tionghoa (Cina). Ini jika dilihat dari sudut pandang orang Tionghoa (Cina) pada umumnya. Karena, mungkin warga

keturunan Cina di Indonesia memandang Islam dari status sosial berada dikelas bawah. Mungkin dengan Islam, mereka merasa secara kultural tidak bisa lagi mengembangkan etos kerjanya. Sehingga sedikit sekali warga keturunan Cina yang memeluk agama Islam. Sementara agama lain seperti Budha dan Kristen lebih mudah mereka terima karena dianggap “lebih dekat” dengan identitas kultural mereka (Rahman, 1998: 45).

Asimilasi dan relasi sosial, bahkan identitas nasional durenungkan kembali pasca kerusuhan Mei 1998 di Jakarta maupun di Solo. Dalam wilayah politik, perenungan itu terbuka oleh proses politik yang mengiringi kejatuhan rezim Orde Baru, yaitu proses demokratisasi yang lebih terbuka. Dalam wilayah politik kebudayaan, kebebasan tersebut menyentuh pada pola penerimaan terhadap warga Tionghoa yang dibuka dengan penghapusan beberapa undang-undang yang dinilai diskriminatif terhadap warga Tionghoa oleh Pemerintahan pasca Orde Baru.

Politik Multikultur: Gejala Berakhirnya Pembauran

Agama telah dijadikan sebagai media pembauran bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Program asimilasi itu dilakukan terutama melalui agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia, juga melalui agama lain yang diakui oleh negara, yaitu Kristen Katolik, Budha atau Hindu. Agama Islam dinilai lebih strategis untuk digunakan sebagai media pembauran. Sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat pribumi, Islam dicitrakan sebagai “agama pribumi”, menjadi Muslim, dianggap sebagai menjadi pribumi. Sementara agama yang dicitrakan milik orang Barat (eropa), yaitu Kristen atau katolik, dicitrakan sebagai agama kolonial, milik penjajah sehingga dicitrakan sebagai bukan bagian “pribumi”. Menjadi muslim bagi orang Cina di Malaysia diartikan sebagai menjadi “orang Melayu”. Ini dikarenakan agama Islam dicitrakan sebagai milik warga pribumi yang notabene adalah “orang Melayu”. Dakwah yang dilakukan oleh juru dakwah di Malaysia kepada warga Cina Malaysia telah menimbulkan krisis identitas bagi orang Cina yang masuk Islam. Orang Cina yang masuk Islam diharapkan memutus akar kultural kecinaannya serta

meninggalkan bahasa Cina dan beralih menggunakan bahasa dan budaya Melayu (Ho, 2000: 21).

Perlakuan rezim Orde Baru telah menciptakan citra dalam benak manusia Indonesia mengenai gambaran etnis Tionghoa sehingga menimbulkan praktik “rasisme tak sengaja”. Rasisme sebagai tindakan, sikap dan tutur kata yang menyiratkan penilaian kualitas seseorang semata-mata atau terutama berdasarkan “ras”. Penilaian itu bisa memuji, bisa menistakan (Guibernau dan Rex, 1997: 205-207). Film Indonesia yang mendewakan wajah-wajah Indo kebule-bulean merupakan sisa rasisme kolonial. Sama rasisnya dengan berbagai acara TV di Indonesia yang memarodikan tokoh-tokoh oriental (Cina, Korea, dan Jepang) secara karikatural. Istilah “Cina” kemudian “WNI Keturunan Cina” adalah “makhluk” ciptaan Orde Baru. Penciptaan tersebut kemudian menjebak Orde Baru dan masyarakatnya melakukan penindasan atas politik kaum minoritas ini. Ketidaksengajaan terjadinya rasisme ini telah dimulai sejak proses administrasi kolonial, pemerintah Hindia Belanda (Heryanto, 2004: 4).

“Kecinaan” masyarakat minoritas di Indonesia tidak berasal dari negeri Tiongkok. Asal-usulnya bisa dilacak dari rekayasa administrasi pemerintah kolonial. Kaum migran asal daratan Cina yang berasal dari beberapa suku yang berbeda dan saling tidak memahami yaitu Hokkain, Kanton, Hakka, Hainan dan Teociu baru “dicinakan” setelah pemerintah Hindia Belanda mengenal teknologi baru dalam administrasi pemerintahan yang dinamakan sensus penduduk. Penduduk jajahan dipilah-pilah dalam formulir dan sejumlah arsip kelembagaan menurut apa yang dianggap oleh penjajah “etnis” berbeda. Sejak saat itu, setiap orang dianggap hanya bisa punya satu etnisitas yang jelas dan tidak tercampur baur (Heryanto, 2004: 4). Model rekayasa ini dilestarikan oleh pemerintah Orde Baru hingga masa tumbangnyanya. Orde Baru pulalah yang dianggap telah mengakarkan pandangan-pandangan “rasis” tersebut melalui kebijakan-kebijakannya atas masyarakat minoritas “etnis Tionghoa”.

Keputusan MPRS No III/Res/MPRS/1966, tentang pembinaan kesatuan Bangsa tanggal 5 Juli 1966 dan Keputusan presidium kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang penggantian nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Cina menjadi nama Indonesia. memaksa

pelaksanaan adat istiadat, ibadat yang memiliki aspek kultural pada negeri leluhur hanya bisa diadakan secara intern dalam keluarga atau perorangan. Instruksi ini dimaksudkan untuk untuk mengurangi jarak antara etnis Cina dan warga negara lainnya. Keempat, Keppres 240/1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. Dalam kebijakan ini ditentukan bahwa WNI keturunan asing sama kedudukannya dalam hukum Indonesia. Sementara pembinaannya dilakukan melalui asimilasi untuk mencegah kehidupan eksklusif rasial, dan perbedaan perlakuan akan ditiadakan. Kelima, Kebijakan pembauran terhadap etnik Cina masuk dalam GBHN sejak 1978. Dalam GBHN 1988 disebutkan “usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan ketahanan nasional (Jahja, 1998: 87).

Para sejarawan dan sosiolog mengungkapkan bahwa istilah kontroversial untuk menyebut orang warga keturunan Tionghoa adalah sebuah rekayasa dan intrik politik pemerintah Orde Baru, persis mewarisi tradisi politik kolonial. Ong Hok Ham menyebut politik kolonial yang diambil Orde Baru yaitu membagi penduduk menjadi golongan-golongan yakni Eropa, Timur Asing termasuk Cina dan Pribumi. Secara substantif, kata “etnisitas” sebenarnya tidak memiliki makna dalam arti sosial. Etnisitas adalah urusan politikus dan sarjana ilmu politik, karena benda ini dibentuk oleh kepentingan politik. Secara obyektif, alamiah, atau biologis yang dinamakan “orang Cina” tidak ada. Juga yang namanya “Pribumi”. Yang ada hanya orang “yang dicinakan” oleh proses sosial. Sebagian yang dicinakan dididik untuk pandai-pandai mencinakan diri (Heryanto, 2004: 5).

Penggantian istilah Cina menjadi Tionghoa terjadi pada masa dekolonisasi. Pasca kemerdekaan media koran mulai menggunakan nama Tionghoa menggantikan istilah Cina. Namun pertama kali istilah Tionghoa digunakan oleh organisasi Tionghoa peranakan yang menamakan diri Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sebuah organisasi pan Cina yang berdiri di Jakarta. Istilah Tionghoa mulai dipopulerkan semasa menguatnya nasionalisme Cina di Jawa sebagai bagian dari solidaritas nasionalisme bangsa Cina. Namun di Jawa (Indonesia) istilah Tionghoa maknanya lebih bergeser pada kaum “Cina Peranakan” (Suryadinata, 1978: 116).

Pemerintah Orde Baru bersikap mendua terhadap keberadaan etnis Tionghoa ini. Orde Baru menyadari, negara yang baru merdeka ini memerlukan percepatan dalam hal pembangunan dan modernisasi. Sementara warga negara Indonesia “pribumi” belum begitu diharapkan mampu melakukan percepatan pembangunan ekonomi ini, justru potensi tersebut ada pada warga etnis Tionghoa, yang secara mental dan pengalaman semasa kolonial, lebih bisa diharapkan. Maka dibukalah kesempatan yang besar bagi etnis Tionghoa untuk berkiprah dibidang ekonomi melalui perkongsian dengan aparat dan pejabat pemerintah. Sebaliknya dibidang lain terutama sosial politik, hak warga etnis Tionghoa dipasung, meskipun dalam undang-undang tertuang persamaan hak dengan warga Indonesia secara kese-luruhan sama, namun kenyataannya hak politik warga Tionghoa dibatasi.

Akhirnya, warga etnis Tionghoa dipaksa hanya bisa untuk berkiprah dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kondisi ini membawa pengaruh pada dominasi ekonomi warga etnis Tionghoa atas ekonomi Indonesia (pribumi). Kemampuan di bidang perdagangan serta kedekatan dengan pejabat (pemerintah) baik ditingkat nasional hingga ke lokal membuat pengusaha kakap etnis Tionghoa mampu menguasai ekonomi dari hulu hingga hilir. Muncullah konglomerasi ekonomi etnis Tionghoa. Kedekatan dengan pejabat dan kemampuan melobby dianggap sebagai bentuk keahlian warga Tionghoa termasuk memberikan suap dan tradisi memberi uang pelicin. Konglomerasi yang mengantarkan ekonomi Indonesia disebut-sebut sebagian besar dikuasai oleh kalangan minoritas Tionghoa. Akibat kebijakan ini muncul pencitraan terhadap etnis Tionghoa sebagai golongan yang kaya, suka menyuap, eksklusif, a sosial, pelit dan rakus. Pencitraan ini semakin mengentalkan perbedaan dan polarisasi antara warga “pribumi dan etnis Tionghoa”.

Sejarah mencatat kekerasan dan kerusuhan yang berbau “rasis” ini dipicu oleh adanya kesenjangan di bidang ini, dan praktek ketidakadilan yang muncul akibat kebijakan pemerintah. Kebijakan pembauran (asimilasi) yang awalnya di disain oleh Orde Baru untuk meredam konflik antara “pribumi” versus “Tionghoa”, sebaliknya malah memperuncing pisau konflik dan memperdalam jurang kesenjangan. Kebijakan pembauran

(asimilasi) dianggap gagal dan hanya mengantarkan kreatornya (Orde Baru) menemui kehancuran/keruntuhan yang ditandai kerusuhan berbau rasial tahun 1998 yang dianggap sebagai kerusuhan terburuk setelah kemerdekaan. Nurhadiantomo melihat kegagalan kebijakan asimilasi karena kebijakan itu hanya sampai pada tingkat “pembauran semu”, atau “asimilasi rekayasa” sebatas kulit luar seperti ganti nama, perubahan adat istiadat dan kepercayaan/agama, serta makin ditinggalkannya bahasa Cina dan meningkatnya kemampuan generasi muda Tionghoa dalam berbahasa Indonesia. Asimilasi ini mengandung unsur paksaan, bertentangan dengan HAM dan ternyata gagal. Sementara bentuk asimilasi yang lebih terlihat wajar dan agak berhasil adalah melalui asimilasi alami seperti perkawinan, dan pertemanan sehingga bisa mewujudkan integrasi sosial. Namun asimilasi model ini juga tidak terlaksana dengan baik karena tereduksi oleh masih adanya jurang pemisah berupa kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan.

Kebijakan pembauran orde baru hanya menajamkan pemilahan sosial, muncul istilah “pri”-“non pri”. Kondisi ini memunculkan potensi konflik yang kemudian pecah dalam bentuk kerusuhan dan kekerasan fisik yang berujung pada kerugian materi dan jiwa (Nurhadiantomo, 2003: 204). Perlahan tapi pasti, kebijakan Orde Baru dalam menangani persoalan hubungan pribum tionghoa melalui pembauran (asimilasi) direduksi oleh pemerintahan era reformasi. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres No. 26/1998 menghapus istilah “pri-non pri” untuk mengurangi perbedaan dan menghapus polarisasi kedua golongan itu. Namun Inpres inipun tidak menyentuh banyak persoalan mendasar. Berikutnya presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

Era reformasi jauh berbeda dengan pemerintahan otoriter Orde Baru, dan akan lebih membiarkan proses hubungan ini secara lebih natural oleh masyarakat sendiri. Perubahan pandangan politik masyarakat terhadap negara bisa membantu hal ini terjadi, di mana kepercayaan dan harapan terhadap peran negara dalam menangani persoalan-persoalan sosial juga berkurang, bahkan bisa dikatakan tidak terlalu mengharap.

Simpulan

Agenda penyebaran multikulturalisme merupakan salah satu cara membuka kesadaran masyarakat untuk bisa lebih menerima perbedaan. Beberapa langkah praktisnya antara lain diperbanyaknya struktur-struktur partisipatoris (*participatory structures*) dimana setiap orang dengan segala perbedaan etnis, gender, status (kedudukan) dan asal-usul geografis ataupun kepercayaan mampu memperkenalkan pandangan masing-masing atas realitas sosial dan menampung representasi suara-suara perbedaan mereka.

Di dalam studi-studi semacam ini, setiap individu bisa menegaskan diri (identitas) siapa “aku” dan siapa “kamu” serta siapa “kita” sebenarnya. Sehingga pemahaman tentang identitas masing-masing itulah yang menegaskan identitas bersama. Dalam suasana dialogis kontestasi itu tidak untuk menghilangkan satu atau yang lainnya tapi penerimaan atas masing-masing perbedaan yang ada. Momentum Tahun Baru Imlek 2553-2555 (2002-2004) merupakan waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk kembali menerima penegasan sebuah identitas, yakni identitas masyarakat etnis Tionghoa. Upaya konversi agama untuk sebuah agenda pembauran kehilangan relevansinya dalam konteks kontestasi budaya global. Pembauran sendiri berangkat adanya rekayasa sosial yang memisahkan (pola binaritas) perbedaan akar kultural “Tionghoa-Pribumi”, sementara kontestasi budaya dalam arena multikultur justru meleburkan entitas perbedaan ke dalam simplifikasi identitas, terjadi pencurian identitas yang melahirkan kebudayaan-kebudayaan alternatif (*subaltern*). Perayaan Tahun Baru Imlek di masjid oleh Masyarakat etnis Tionghoa di Yogyakarta merupakan bentuk peleburan identitas antara Tionghoa-Islam-Jawa.

Pembauran melalui konversi agama bisa dilakukan secara efektif dengan mengikuti pendekatan kultural. Proses dekonstruksi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan di Masjid tidak terhindarkan karena beberapa hal. *Pertama*, pengaruh globalisasi, era konsumsi dan produksi kapitalisme yang menyerang sampai ke bagian-bagian pribadi kehidupan manusia, seperti spiritualitas dan identitas. Kapitalisme global telah mendorong budaya simplifikasi kehidupan melalui kegiatan konsumsi yang sudah menjadi ritual budaya saat ini. Penyederhanaan dan pendangkalan ini juga terjadi pada kegiatan-kegiatan ritual-spiritual

seperti Natal, lebaran dan Tahun Baru Imlek. Semua gaya dibentuk dalam bentuk selera pasar yang menafikan sedikit demi sedikit makna dan arti substansial kegiatan ibadah itu sendiri. *Kedua*, untuk kasus Indonesia masa transisi dari pemerintahan otoriter rezim Orde Baru ke reformasi semakin mene-gaskan kebutuhan diterapkannya sikap-sikap demokratis oleh pengelola negara.

Cara-cara yang dilakukan oleh Orde Baru yang menganut pola modernis dan ideologi pembangunan telah membungkam suara-suara identitas kultural. Operasi *panopticon* mengekang kebebasan dan meng-hilangkan keragaman yang pada dasarnya menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Hal-hal pribadi dari kehidupan penduduk (*citizenship*) seperti agama dan kepercayaan, pilihan gaya hidup serta orientasi hasrat konsumsi, tidak lagi layak dicampuri oleh kekuasaan (negara). *Ketiga*, ada semangat perubahan paradigma pandangan etnis Tionghoa di Indonesia terhadap kebudayaannya. Kebebasan berekspresi membuat mereka sadar tentang akar budayanya.

Daftar Pustaka

- Bell, Daniel. T.t. *The Cultural Contradictions of Capitalism*. New York: Basic Books Inc. Publishers.
- Dahana, A. 1998. *Pembauran Lewat Inkorporasi, dalam Kapok Jadi Nonpri*, Alfian Hamzah. (Ed.). Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Ezerman, J.L.J.F. 1922. *Perihal Kelenteng Koan Iem, Tiao-Kak-Sie di Cirebon*, Terjemahan oleh S.M. Latif, Bureau Van De Volkslektur. Jakarta: Balai Pustaka.
- Delanty, Gererd. 2003. *Community*. London: Routledge
- Larking, Paul Nesbitt. 2007. *Politics, Society, and the Media*. New York: Broadview Press.
- Guibernau, Montserrat and John Rex. 1997. *The Ethnicity Reader, Nationalism, Multiculturalism, and Migration*. USA: Blackwell publisher and Cambridge: polity press.
- Heddy, Shri Ahimsa. 2004. *Imlek Gaya Yogya, Makalah Tidak Terbit*

- Heryanto, Ariel. 1998. *Kapok Jadi Nonpri, dalam Kapok Jadi Nonpri*. Alfian Hamzah. (Ed.). Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Herliyanto. 2004. *Masalah Cina di Indonesia*. (Online), <http://siutao.com/budayabangsa./html>.
- Humphrey, Michael. 2002. *The Politics of Atrocity and Reconciliation*. London and New York: Routledge.
- Jahja, Junus H. 2002. *Peranakan Idealis Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya*, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jahja, Junus H. (Ed.). 1991. *Nonpri Dimata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Jahja, Junus H. 1991. *WNI Beragama Islam*. Jakarta: Yayasan Abdul Karim Oei Tjeng Hien.
- Jahja, Junus H. (Ed.). 1984. *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa, Rekaman Dakwah Islamiyah*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah.
- Nurhadiantomo. 2004. *Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosial Posmodern*. Yogyakarta: Juxtapos Press dan Kreasi Wacana.
- Suryadinata, Leo dkk. 2003. *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Sen, Amartya. 2006. *Identity and Violence, The Illusions of Destiny*. England: London, Pinguin Books.
- Stone, Brat Elliot. 1984. *Subjugated Knowledges in the Age of the World Picture, Foucault, Heidegger. And the goal of Geneology*. Loyola Marymount University.
- Yasraf A.P. 2003. *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.